

No. Katalog: 9302020.52
ISSN: 2354-7529



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MENURUT PENGELOUARAN 2020 - 2024

Volume 11, 2025



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No. Katalog: 9302020.52

ISSN: 2354-7529

<https://ntb.bps.go.id>

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MENURUT PENGELUARAN 2020 - 2024

Volume 11, 2025



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MENURUT PENGELUARAN 2020-2024

ISSN: 2354-7529

Katalog: 9302020.52

No. Publikasi: 52000.25007

Ukuran Buku: 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman: xii + 67 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dicetak oleh:

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part or all of this book for commercial purpose without permission from BPS Statistic Indonesia.

TIM PENYUSUN

Pengarah

Wahyudin

Penanggung Jawab

I Gusti Lanang Putra

Editor

Ni Nyoman Ratna Puspitasari

Penulis

Ni Nyoman Ratna Puspitasari

Deta Ariesandy

Pengolah Data

Ni Nyoman Ratna Puspitasari

Deta Ariesandy

Desain Cover dan Infografis

Adlan Felardhi

Desain dan Tata Letak

Adlan Felardhi

Foto

Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Supported By

Freepik Company

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

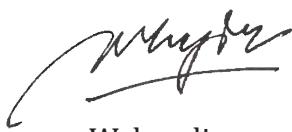
Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB Menurut Lapangan Usaha/*Industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB Menurut Pengeluaran/*Expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB Menurut Pendapatan/*Income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), dan Net Ekspor. Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts* (SNA) 2008 seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kami menyadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi selanjutnya. Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Mataram, April 2025

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Wahyudin





DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
BAB I. Pendahuluan	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2
1.2 Kegunaan Statistik PDRB	3
BAB II. Metode Estimasi dan Sumber Data	5
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	6
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	9
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	11
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	13
2.5 Perubahan Inventori	18
2.6 Ekspor Impor	21
BAB III. Tinjauan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024	23
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Pengeluaran.....	24
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	29
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	34
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	35
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto	38
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	40
3.7 Perkembangan Ekspor	41
3.8 Perkembangan Impor	43
BAB IV. Perkembangan Agregat PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024	45
4.1 Produk Domestik Regional Bruto (Nominal)	46
4.2 Perbandingan Pengeluaran PDRB Untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor Barang Dan Jasa	47
4.3 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB	48
4.4 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PDRB	49



DAFTAR ISI

4.5 Perbandingan Ekspor Terhadap PDRB	49
4.6 Perbandingan PDRB Terhadap Impor	50
4.7 Keseimbangan Total Penyediaan Dan Total Permintaan	51
4.8 Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	53
4.9 Rasio Perdagangan Internasional (RPI)	54
4.10 <i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	55
BAB V. Penutup	57
Daftar Pustaka	59
Lampiran	63

https://ntb.bps.go.id

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1.	PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku, 2020-2024 (miliar rupiah)	24
Tabel 2.	PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2020-2024 (miliar rupiah)	25
Tabel 3.	Distribusi PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku, 2020-2024 (persen)	26
Tabel 4.	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku, 2020-2024 (persen)	28
Tabel 5.	Indeks Harga Implisit PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Pengeluaran, 2020-2024 (persen)	29
Tabel 6.	Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024 (persen)	30
Tabel 7.	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Kelompok Konsumsi, 2020-2024 (persen)	32
Tabel 8.	Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Kelompok Konsumsi, 2020-2024 (persen)	33
Tabel 9.	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Kelompok Konsumsi, 2020-2024 (persen)	34
Tabel 10.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024	35
Tabel 11.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024	36
Tabel 12.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Kelompok, 2020-2024	37
Tabel 13.	Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024	39
Tabel 14.	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024	41
Tabel 15.	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024	42
Tabel 16.	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024	44
Tabel 17.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024	46
Tabel 18.	Rasio PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024	47
Tabel 19.	Rasio PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024	48



DAFTAR TABEL

Halaman	Tabel
49	Tabel 20. Rasio Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024
50	Tabel 21. Rasio Eksport Barang dan Jasa terhadap PMTB Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024
51	Tabel 22. Rasio PDRB terhadap Impor Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024
52	Tabel 23. Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024 (miliar rupiah)
53	Tabel 24. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024
54	Tabel 25. Rasio Perdagangan Internasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024
56	Tabel 26. <i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i> Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024

https://ntb.bps.go.id



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2020-2024 (miliar rupiah)	26
Gambar 2.	Distribusi PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku, 2024 (persen)	27
Gambar 3.	Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024 (miliar rupiah) ..	30
Gambar 4.	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2024 (persen)	31
Gambar 5.	Proporsi Sub Komponen Bangunan dan Non Bangunan terhadap Total PMTB Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024 (persen)	39
Gambar 6.	Perkembangan Ekspor Luar Negeri Komoditas Konsentrat Tembaga, 2020-2024 (juta USD)	42

https://ntb.bps.go.id

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah (*region*) tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat level perekonomian serta pergeseran dari struktur perekonomian suatu daerah. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi, 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah

upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran,

PDRB menurut pendekatan ini adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2. KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian suatu daerah setiap tahun. Manfaat yang diperoleh dari data ini antara lain:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap ekonomi dalam suatu negara yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri dan perdagangan antar daerah.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah.



7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

https://ntb.bps.go.id

BAB II

METODE ESTIMASI

DAN SUMBER DATA



2.1. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

1. Pendahuluan

Rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

2. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

3. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*). Klasifikasi COICOP adalah sebagai berikut:

- a. Makanan dan minuman tidak beralkohol
- b. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
- c. Pakaian dan alat kaki
- d. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
- e. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
- f. Kesehatan
- g. Angkutan
- h. Komunikasi
- i. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
- j. Pendidikan
- k. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
- l. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu

- a. Makanan, Minuman, dan Rokok
- b. Pakaian dan Alas Kaki
- c. Perumahan, Perkakas, Perelngkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
- d. Kesehatan dan Pendidikan
- e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
- f. Hotel dan Restoran
- g. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sbb:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.



4. Penghitungan PKRT Tahunan

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) adalah:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator *supply* komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

b. Metode Penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *supply* dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT Atas Dasar Harga Berlaku (ADH Berlaku). PKRT Atas Dasar Harga Konstan (ADH Konstan) 2010, diperoleh dengan cara melakukan *deflate* PKRT ADH Berlaku dengan IHK tahun dasar 2010. Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sebagai berikut:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu $\times (30/7) \times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun.
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan $\times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun.
2. Data poin pertama dikelompokan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;

3. Terhadap data poin kedua dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator *supply* komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
4. Diperoleh nilai PKRT ADH Berlaku yang telah di-*adjust*;
5. Menyusun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
6. PKRT ADH Konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin keempat dengan hasil poin kelima.

2.2. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

1. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

2. Konsep dan Definisi

LNPRT merupakan bagian dari Lembaga Non Profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga. Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- a. LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- b. Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- c. Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- d. Kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- e. Istilah nonprofit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang



bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi profesi, perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, dan organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

3. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai *output* non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai *output* non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contohnya pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contohnya upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya.
- c. Penyusutan.
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN, dll.

4. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) adalah:

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP)

Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.

- Hasil *up-dating* direktori LNPRT

Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.

- Indeks Harga Konsumen (IHK)

b. Metode Penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut:

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai

harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : jenis LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 7$

- Mengestimasi PK-LNPRT dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT Atas Dasar Harga Berlaku

N_i : populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT Atas Dasar Harga Berlaku (ADH Berlaku). PK-LNPRT Atas Dasar Harga Konstan (ADH Konstan) 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PK-LNPRT ADH. BERLAKU dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

1. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.



2. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan. Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan, dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
- b. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non komoditi (pendapatan jasa).

3. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik provinsi, kabupaten/kota, maupun desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD). Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup:

- a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi;
- b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan;
- c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi;
- d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

4. Penghitungan PK-P Tahunan

a. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- Data realisasi APBN Tahunan (Kementerian Keuangan/DJPB)
- Data realisasi APBD Tahunan (Kementerian Keuangan/BPKAD)
- Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- *Output* Bank Indonesia (BI)
- Gaji Pegawai Negeri Sipil (Kementerian Keuangan)
- Indeks Harga (BPS)

b. Metode Penghitungan

- **PK-P Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku**

$$\text{PK-P ADH Berlaku} = \text{output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output BI}$$

Output non pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level provinsi, PK-P Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah provinsi itu sendiri ditambah pengeluaran akhir konsumsi pemerintah (seluruh pemerintah kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi tersebut) ditambah pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut ditambah pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari provinsi yang bersangkutan.

- **PK-P Provinsi Atas Dasar Harga Konstan**

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh. Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

1. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori. PMTB erat



kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

2. Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidayakan. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah bruto mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

3. Cakupan

PMTB terdiri dari:

- a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
- b. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- c. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

4. Penghitungan PMTB Tahunan

a. Sumber Data

- *Output* industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah Tangga (level provinsi).
- Laporan keuangan perusahaan.
- Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- Publikasi Statistik Konstruksi.
- Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

b. Metode Penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan langsung adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan tidak langsung adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan arus komoditas. Dalam hal ini penyediaan atau *supply* dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

• Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai Atas Dasar Harga (ADH) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak



yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai ADH Berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB ADH Konstan, maka PMTB ADH Berlaku tersebut di-*deflate* (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

- **Pendekatan Tidak Langsung**

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai *output* industri konstruksi, baik ADH Berlaku maupun ADH Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB ADH Berlaku. Untuk memperoleh nilai ADH Konstan adalah dengan menlakukan *deflate* PMTB ADH Berlaku dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data *output* tidak tersedia adalah dengan cara ekstrapolasi atau mengalikan PMTB ADH Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB ADH Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB ADH Berlaku, nilai PMTB ADH Konstan tersebut di-*reflate* (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB ADH Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara. Pertama, PMTB ADH Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal

tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). Kedua, untuk memperoleh PMTB ADH Konstan adalah dengan cara men-*deflate* PMTB ADH Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB ADH Berlaku untuk barang modal tak berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh. Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB ADH Konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai ADH Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan.

Untuk perangkat lunak, PMTB ADH Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Untuk PMTB ADH Konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai PMTB ADH Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data impor film diperoleh dari nilai impor film. Nilai PMTB ADH Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai PMTB ADH Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak langsung (arus komoditas), yaitu:

- Rasio penggunaan *output* industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- Selang (*lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu terlalu lama.



2.5. PERUBAHAN INVENTORI

1. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

2. Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses penggerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen. Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

3. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sebagai berikut:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

4. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD;
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang;
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak



dari Ditjennak Kementeran.

b. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi korporasi, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi komoditas. Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

• Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- i. Menghitung posisi inventori atas dasar harga konstan, dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- ii. Menghitung perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- iii. Menghitung perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan melakukan perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

• Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori atas dasar harga konstan dihitung dengan cara sebagai berikut:

- i. Men-*deflate* nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan indeks harga yang sesuai,

- ii. Mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori antara lain sebagai berikut:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara melakukan *mark-up* guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6. EKSPOR IMPOR

1. Pendahuluan

Aktivitas ekspor impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

2. Konsep dan Definisi

Eksport impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.



3. Cakupan

Ekspor impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke luar negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke luar negeri ke/dari provinsi tersebut

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya

- c. Net ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

4. Penghitungan Ekspor Impor Tahunan

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen ekspor impor adalah:

- Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei
- Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

b. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Di samping itu nilai ekspor impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB Menurut Lapangan Usaha dengan PDRB Menurut Pengeluaran.

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BERDASARKAN PDRB PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MENURUT PENGELOUARAN TAHUN 2020-2024



Perubahan struktur ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2020-2024 tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Nusa Tenggara Barat digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat cenderung fluktuatif pada periode 2020-2024. Hal ini terlihat dari PDRB yang mengalami peningkatan dan kontraksi sepanjang periode tersebut yang digambarkan melalui Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Tabel 1. PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku, 2020-2024 (miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	82.080,74	85.140,96	91.821,64	98.205,32	104.986,16
2. Konsumsi LNPRT	2.178,74	2.230,78	2.476,77	2.725,54	3.091,47
3. Konsumsi Pemerintah	20.730,28	21.213,21	21.997,45	22.802,91	24.610,56
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	49.488,70	53.100,50	54.581,65	61.284,64	64.075,34
5. Perubahan Inventori	824,35	320,97	346,13	336,96	1.599,89
6. Ekspor Barang dan Jasa	49.031,39	56.696,35	84.361,85	78.461,89	86.096,17
7. Impor Barang dan Jasa	70.720,45	78.587,49	98.642,82	97.421,80	102.194,40
PDRB	133.613,74	140.115,27	156.942,67	166.395,45	182.265,19

Nilai PDRB Nusa Tenggara Barat Atas Dasar Harga Berlaku selama periode tahun 2020-2024 terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Pada tahun 2024, PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Dasar Harga Berlaku tercatat sebesar 182,26 triliun rupiah. Jika dilihat menurut komponen penyusunnya, peningkatan PDRB ADHB tercatat pada seluruh komponen penyusunnya.

Tabel 2. PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2020-2024 (miliar rupiah)

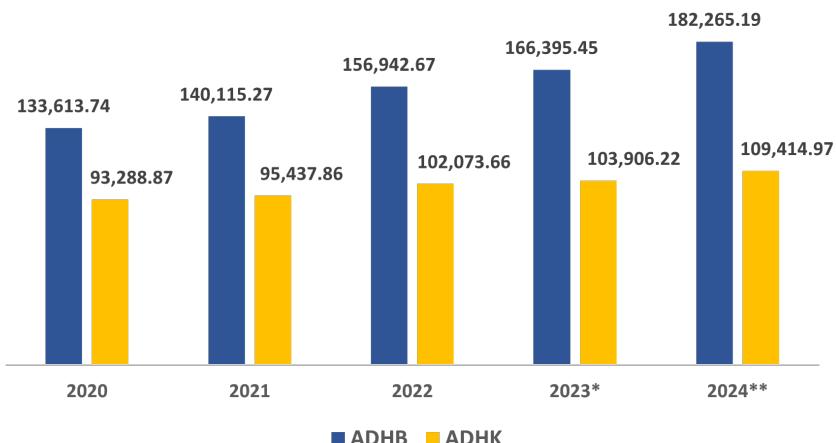
Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	56.729,84	57.753,14	60.050,17	62.459,15	65.238,19
2. Konsumsi LNPRT	1.488,08	1.496,15	1.583,83	1.680,74	1.870,02
3. Konsumsi Pemerintah	12.509,34	12.574,48	12.721,80	12.940,51	13.609,62
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	30.386,40	31.589,13	30.968,09	33.748,53	34.798,33
5. Perubahan Inventori	296,77	113,10	119,39	122,78	523,39
6. Ekspor Barang dan Jasa	25.504,20	28.073,11	40.832,87	36.425,22	38.526,63
7. Impor Barang dan Jasa	33.625,75	36.161,25	44.202,48	43.470,71	45.151,21
PDRB	93.288,87	95.437,86	102.073,66	103.906,22	109.414,97

Selain dinilai Atas Dasar Harga Berlaku, PDRB Menurut Pengeluaran juga dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010 atau berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun dasar 2010. Melalui pendekatan penghitungan Atas Dasar Harga Konstan, PDRB di setiap tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB Komponen Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir.

Selama kurun waktu 2020-2024, gambaran tentang perkembangan ekonomi Nusa Tenggara Barat berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dapat dilihat pada Tabel 2. Pada periode waktu tersebut, sebagian besar komponen pengeluaran akhir PDRB Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2024, PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi NTB sebesar 109,41 triliun rupiah. Sejalan dengan perkembangan pada PDRB ADHB, seluruh komponen penyusun PDRB Menurut Pengeluaran ADHK juga mengalami peningkatan.



Gambar 1. PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2020-2024 (miliar rupiah)



Dari grafik di atas, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. Sedangkan dalam penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

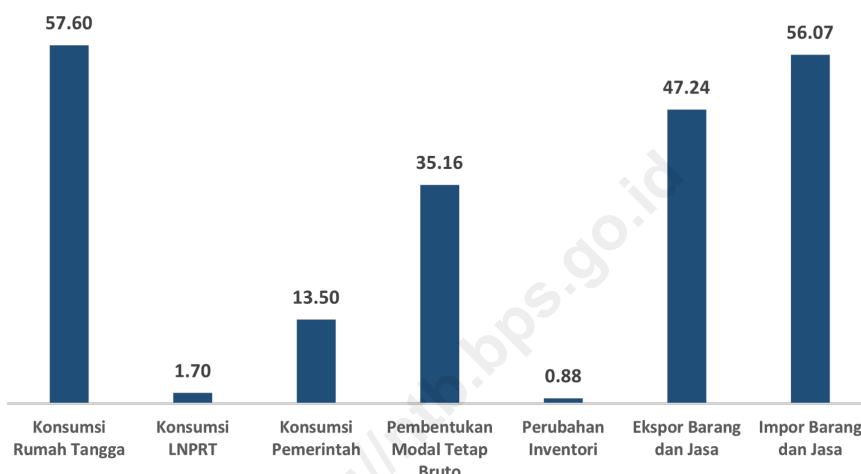
Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluaran, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori, ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

Tabel 3. Distribusi PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku, 2020-2024 (persen)

Komponen Pengeluaran		2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. Konsumsi Rumah Tangga	61,43	60,76	58,51	59,02	57,60	
2. Konsumsi LNPRT	1,63	1,59	1,58	1,64	1,70	
3. Konsumsi Pemerintah	15,52	15,14	14,02	13,70	13,50	
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	37,04	37,90	34,78	36,83	35,16	
5. Perubahan Inventori	0,62	0,23	0,22	0,20	0,88	
6. Ekspor Barang dan Jasa	36,70	40,46	53,75	47,15	47,24	
7. Impor Barang dan Jasa	52,93	56,09	62,85	58,55	56,07	
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Berdasarkan Tabel 3 diatas terlihat bahwa selama periode 2020-2024, produk yang dihasilkan di wilayah domestik Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga yang ditunjukkan oleh besarnya kontribusi komponen konsumsi rumah tangga yang mencapai 58 persen. Sejalan dengan hal tersebut, kontribusi komponen impor barang dan jasa pada perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memenuhi permintaan domestik pada tahun 2024 mencapai 56,07 persen.

Gambar 2. Distribusi PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku, 2024 (persen)



Komponen ekspor barang dan jasa juga mempunyai peran yang relatif besar terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kontribusi komponen ekspor barang dan jasa pada tahun 2024 sebesar 47,24 persen dipengaruhi oleh adanya produk dari Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu menembus pasar internasional dan regional, salah satunya komoditas konsentrat tembaga. Di sisi lain, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 36,16 persen. Sedangkan proporsi konsumsi akhir pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 13,50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar.

Dari sisi neraca perdagangan internasional maupun regional Nusa Tenggara Barat direpresentasikan oleh transaksi ekspor barang dan jasa serta impor barang dan jasa. Pada tahun 2020-2024, perdagangan internasional maupun regional Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa nilai impor cenderung lebih tinggi dari nilai ekspor. Kecenderungan tersebut dalam perdagangan internasional dan regional Nusa Tenggara Barat selalu menunjukkan posisi defisit.



Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku, 2020-2024 (persen)

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	-2,93	1,80	3,98	4,01	4,45
2. Konsumsi LNPRT	-1,70	0,54	5,86	6,12	11,26
3. Konsumsi Pemerintah	1,16	0,52	1,17	1,72	5,17
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-5,53	3,96	-1,97	8,98	3,11
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	8,36	10,07	45,45	-10,79	5,77
7. Impor Barang dan Jasa	-2,39	7,54	22,24	-1,66	3,87
PDRB	-0,62	2,30	6,95	1,80	5,30

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (economic growth). Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tertentu menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi dalam satu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. Pada rentang waktu 2020-2024, pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertinggi terjadi pada tahun 2022 yakni sebesar 6,95 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang terendah terjadi pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi 0,62 persen akibat adanya pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh wilayah di dunia. Pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas masyarakat membuat daya beli melemah dan roda ekonomi tersendat selama beberapa waktu sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat bernilai negatif. Pada tahun 2024, ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat tumbuh sebesar 5,30 persen.

Tabel 5. Indeks Harga Implisit PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Pengeluaran, 2020-2024 (persen)

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	144,69	147,42	152,91	157,23	160,93
2. Konsumsi LNPRT	146,41	149,10	156,38	162,16	165,32
3. Konsumsi Pemerintah	165,72	168,70	172,91	176,21	180,83
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	162,86	168,10	176,25	181,59	184,13
5. Perubahan Inventori	277,78	283,80	289,93	274,44	305,68
6. Ekspor Barang dan Jasa	192,25	201,96	206,60	215,41	223,47
7. Impor Barang dan Jasa	210,32	217,33	223,16	224,11	226,34
PDRB	143,23	146,81	153,75	160,14	166,58

¹ Indeks Perkembangan

Sementara itu, indeks harga implisit¹ PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga terus menunjukkan peningkatan selama tahun 2020-2024. Nilai indeks implisit di Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai nilai tertinggi pada tahun 2024 yaitu sebesar 166,58. Hal ini berarti barang dan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen mengalami peningkatan setiap tahunnya.

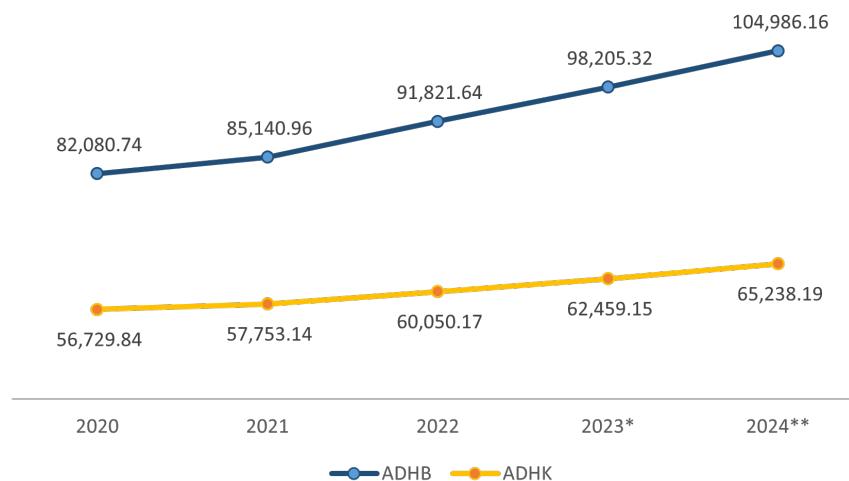
3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB Menurut Pengeluaran di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tabel 6 berikut menunjukkan sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga di dalam PDRB Menurut Pengeluaran dirinci ke dalam 7 sub komponen sebagai berikut:

- Makanan, Minuman, dan Rokok
- Pakaian dan Alas Kaki
- Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
- Kesehatan dan Pendidikan
- Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
- Hotel dan Restoran
- Lainnya



Gambar 3. Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024 (miliar rupiah)



Gambar 3 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2020-2024 konsumsi akhir rumah tangga cenderung mengalami peningkatan, baik dalam nominal (Atas Dasar Harga Berlaku) maupun riil (Atas Dasar Harga Konstan). Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan rata-rata konsumsi perkapita.

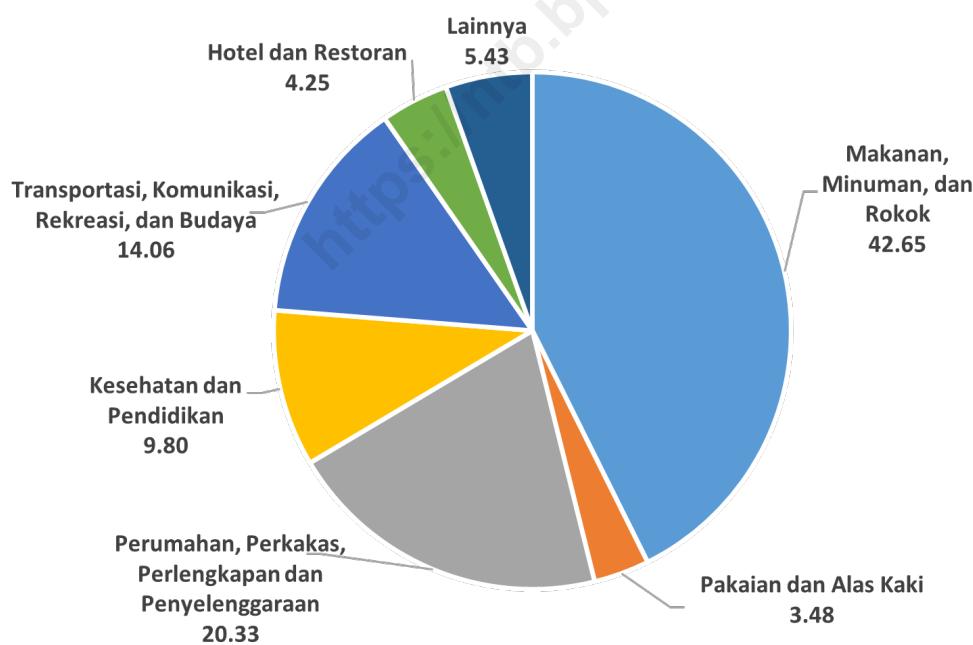
Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (miliar rupiah)					
a. ADH Berlaku	82.080,74	85.140,96	91.821,64	98.205,32	104.986,16
b. ADH Konstan 2010	56.729,84	57.753,14	60.050,17	62.459,15	65.238,19
Proporsi Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB ADH Berlaku (persen)	61,43	60,76	58,51	59,02	57,60
Rata-rata Konsumsi Per Kapita Per Tahun (ribu rupiah)					
a. ADH Berlaku	15.428,44	15.804,46	16.774,23	17.661,92	18.594,74
b. ADH Konstan 2010	10.663,32	10.720,54	10.970,13	11.233,08	11.554,73
Laju Pertumbuhan (persen)					
a. Konsumsi Rumah Tangga	-2,93	1,80	3,98	4,01	4,45
b. Rata-rata Konsumsi Per Kapita	-11,97	0,15	2,32	2,38	2,85
Jumlah Penduduk (ribu orang)	5.320	5.387	5.474	5.560	5.646

Peningkatan konsumsi rumah tangga pada kurun waktu 2020-2024 sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sejak tahun 2021 terjadi peningkatan geliat ekonomi akibat sudah normalnya aktivitas masyarakat pasca pandemi COVID-19. Laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga pun terus meningkat hingga tahun 2024.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi NTB pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,93 persen akibat terjadinya pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas masyarakat. Kemudian sejak tahun 2021 konsumsi rumah tangga terus mengalami peningkatan hingga 4,45 persen pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan mulai terjadi perbaikan dalam pengeluaran konsumsi masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Gambar 4. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2024 (persen)



Kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Pengeluaran pada periode tahun 2020-2024 cukup berfluktuatif. Share tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu 61,43 persen dan share terendah terjadi pada tahun 2024 yaitu 57,60 persen. Tingginya kontribusi komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB ini akan membuat pergerakannya berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi secara umum.



Tabel 7. Struktur² Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Kelompok Konsumsi, 2020-2024 (persen)

Komponen Pengeluaran		2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	25,79	25,76	24,48	24,90	24,57	
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,28	2,22	2,09	2,09	2,00	
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	12,96	12,69	12,08	12,14	11,71	
d. Kesehatan dan Pendidikan	6,29	6,34	5,90	5,85	5,65	
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	8,44	8,28	8,42	8,42	8,10	
f. Hotel dan Restoran	2,40	2,33	2,47	2,50	2,45	
g. Lainnya	3,27	3,14	3,07	3,14	3,13	
Total Konsumsi Rumah Tangga	61,43	60,76	58,51	59,02	57,60	

² Diturunkan dari perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Selama tahun 2020-2024, berdasarkan struktur pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga pada Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa konsumsi bukan makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk Makanan, Minuman, dan Rokok cenderung masih berada pada kisaran yang relatif sama dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 pengeluaran akhir rumah tangga untuk sub komponen Makanan, Minuman, dan Rokok memiliki kontribusi hingga 24,57 persen dari total PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Meskipun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Tabel 8. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Kelompok Konsumsi, 2020-2024 (persen)

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	-1,91	1,55	1,47	3,66	5,06
b. Pakaian dan Alas Kaki	-1,48	0,84	2,72	3,78	4,06
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1,31	1,46	3,39	4,85	4,17
d. Kesehatan dan Pendidikan	0,54	5,00	3,28	3,79	4,21
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	-11,45	1,77	8,34	3,58	3,62
f. Hotel dan Restoran	-7,92	0,61	14,65	4,46	5,07
g. Lainnya	-0,57	0,66	6,07	5,02	4,03
Total Konsumsi Rumah Tangga	-2,93	1,80	3,98	4,01	4,45

Sejak tahun 2021 perekonomian Provinsi NTB sudah menunjukkan perbaikan yang signifikan setelah sebelumnya masih tertahan karena adanya pandemi COVID-19. Pada tahun 2024 komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) mengalami pertumbuhan hingga 4,45 persen yang secara umum disebabkan antara lain oleh peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Tabel 8 diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2024 seluruh sub komponen konsumsi akhir rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami pertumbuhan yang positif dibandingkan dengan tahun 2023. Sub komponen dengan pertumbuhan tertinggi adalah sub komponen Hotel dan Restoran yang mencapai 5,07 persen. Sub komponen dengan laju tertinggi berikutnya adalah sub komponen Makanan, Minuman, dan Rokok yang tumbuh sebesar 5,06 persen. Hal ini menunjukkan membaiknya daya beli masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari seluruh pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sub komponen Makanan, Minuman, dan Rokok memiliki peran yang paling besar yaitu mencapai 24,57 persen. Artinya, laju pertumbuhan konsumsi akhir rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat dipengaruhi oleh besarnya konsumsi makanan, minuman, dan rokok. Sedangkan sub komponen Pakaian dan Alas Kaki memiliki peran yang paling kecil terhadap pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, yaitu hanya sebesar 2,00 persen.



Tabel 9. Pertumbuhan Implisit³ (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Kelompok Konsumsi, 2020-2024 (persen)

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	0,26	3,14	4,90	4,03	2,89
b. Pakaian dan Alas Kaki	1,92	1,19	2,98	2,03	1,00
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	-0,01	1,20	3,08	1,66	1,41
d. Kesehatan dan Pendidikan	1,45	0,66	0,94	1,29	1,52
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	0,43	1,10	5,10	2,27	1,77
f. Hotel dan Restoran	0,42	1,18	3,38	2,51	2,19
g. Lainnya	0,76	0,18	3,19	3,13	4,94
Total Konsumsi Rumah Tangga	0,77	1,89	3,72	2,83	2,35

³ Tingkat perubahan harga produk konsumsi

Sementara itu, tingkat perubahan harga (pertumbuhan indeks harga implisit) disajikan dalam Tabel 9, menunjukkan peningkatan setiap tahunnya untuk setiap sub komponen. Pada tahun 2024, seluruh sub komponen pada komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami inflasi yang relatif terkendali. Inflasi tertinggi terjadi pada sub komponen Lainnya, seperti pembelian barang pribadi, yang mencapai 4,94 persen. Inflasi tertinggi berikutnya terjadi pada sub komponen Hotel dan Restoran yaitu sebesar 2,19 persen. Sedangkan sub komponen dengan inflasi paling rendah adalah sub komponen Pakaian dan Alas Kaki yang hanya sebesar 1,00 persen.

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT memiliki peran yang paling kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya dalam PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Pengeluaran. Konsumsi akhir LNPRT adalah pengeluaran yang dikonsumsi oleh Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga seperti organisasi masyarakat, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, panti asuhan, pondok pesantren, dll. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat semestinya perlu ditingkatkan lagi.

Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT (miliar rupiah)					
a. ADH Berlaku	2.178,74	2.230,78	2.476,77	2.725,54	3.091,47
b. ADH Konstan 2010	1.488,08	1.496,15	1.583,83	1.680,74	1.870,02
Proporsi Konsumsi LNPRT terhadap PDRB ADH Berlaku (persen)	1,63	1,59	1,58	1,64	1,70
Laju Pertumbuhan Konsumsi LNPRT (persen)	-1,70	0,54	5,86	6,12	11,26

Dari Tabel 10, menunjukkan proporsi Konsumsi Akhir LNPRT terhadap PDRB pada tahun 2020-2024 berada pada kisaran 1,58-1,70 persen. Sedangkan dari sisi laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 11,26 persen. Tingginya laju pertumbuhan konsumsi akhir LNPRT pada tahun 2024 disebabkan oleh pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan anggota legislatif pada Bulan Februari 2024 dan dilanjutkan dengan peningkatan kegiatan partai politik untuk pelaksanaan pemilukada serentak Gubernur/Bupati/Walikota se-Provinsi NTB. Sebaliknya, laju pertumbuhan terrendah terjadi pada tahun 2020 hingga mengalami kontraksi sebesar 1,70 persen. Penurunan ini terjadi salah satunya karena berkurangnya biaya yang dikeluarkan pada tahun 2020 oleh institusi-institusi LNPRT pasca Pemilu 2019.

3.4. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Konsumsi pemerintah dibedakan antara konsumsi individu dan konsumsi kolektif. Konsumsi individu merupakan pengeluaran pemerintah untuk kepentingan rumah tangga individu antara lain pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, olah raga dan rekreasi, dan kebudayaan. Konsumsi kolektif merupakan pengeluaran pemerintah untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan (umum)/semua anggota masyarakat mendapatkan manfaat dari jasa seperti ini. Jasa kolektif yang diberikan oleh pemerintah antara lain keamanan dan pertahanan, peraturan-peraturan yang menyangkut



kemasyarakatan, pemeliharaan undang-undang dan peraturan, perlindungan lingkungan, penelitian dan pengembangan, infrastruktur dan pembangunan ekonomi.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah (miliar rupiah)					
a. ADH Berlaku	20.730,28	21.213,21	21.997,45	22.802,91	24.610,56
b. ADH Konstan 2010	12.509,34	12.574,48	12.721,80	12.940,51	13.609,62
Proporsi Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB ADH Berlaku (persen)	15,52	15,14	14,02	13,70	13,50
Rata-rata Konsumsi Per Kapita Per Tahun (ribu rupiah)					
a. ADH Berlaku	3.896,60	3.937,74	4.018,56	4.101,03	4.358,93
b. ADH Konstan 2010	2.351,34	2.334,16	2.324,05	2.327,31	2.410,48
Laju Pertumbuhan⁴ (persen)					
a. Konsumsi Pemerintah	1,16	0,52	1,17	1,72	5,17
b. Rata-rata Konsumsi Per Kapita	-2,03	-0,73	-0,43	0,14	3,57
Jumlah Penduduk (ribu orang)	5.152	5.320	5.387	5.474	5.560

⁴ Diturunkan dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku maupun PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010. Pada tahun 2020 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 20.730,28 miliar rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2024 nilainya mencapai 24.610,56 miliar rupiah. Demikian halnya nilai konsumsi pemerintah Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk,

baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, yang kemudian diikuti oleh peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Pada Tabel 11, ditunjukkan bahwa pada tahun 2020 konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 3,90 juta rupiah dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 4,36 juta rupiah per kapita pada tahun 2024.

Namun dari sisi peranan komponen Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat justru cenderung mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020, komponen Konsumsi Pemerintah memegang peranan sebesar 15,52 persen terhadap PDRB. Kemudian pada tahun 2024 peranan komponen ini terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat turun hingga mencapai 13,50 persen.

Tabel 12. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Kelompok, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Struktur Konsumsi Akhir (Belanja) Pemerintah⁵					
a. Konsumsi Kolektif (miliar rupiah)	10.203,71	10.319,11	10.819,40	11.404,31	12.377,80
Proporsi Konsumsi Kolektif (persen)	49,22	48,64	49,18	50,01	50,29
b. Konsumsi Individu (miliar rupiah)	10.526,57	10.894,10	11.178,05	11.398,60	12.232,76
Proporsi Konsumsi Individu (persen)	50,78	51,36	50,82	49,99	49,71
Total Konsumsi Akhir Pemerintah (miliar rupiah)	20.730,28	21.213,21	21.997,45	22.802,91	24.610,56
Total Proporsi Konsumsi Akhir Pemerintah (persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Laju Pertumbuhan (persen)					
a. Konsumsi Kolektif	0,55	-0,83	1,50	2,73	5,15
b. Konsumsi Individu	1,82	1,99	0,82	0,64	5,20
Laju Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah	1,16	0,52	1,17	1,72	5,17
Pertumbuhan Indeks Harga Implisit⁶ (persen)					
a. Konsumsi Kolektif	1,73	1,98	3,30	2,61	3,22
b. Konsumsi Individu	0,99	1,47	1,77	1,32	2,02
Pertumbuhan Implisit Konsumsi Pemerintah	1,40	1,80	2,50	1,91	2,62

⁵ Diturunkan dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

⁶ Tingkat perubahan harga produk konsumsi



Secara struktur, bagian terbesar dari pengeluaran pemerintah didominasi oleh pengeluaran konsumsi individu. Namun selama 5 tahun terakhir, peranan konsumsi individu terhadap konsumsi akhir pemerintah cenderung mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2024 peranan konsumsi individu terhadap konsumsi akhir pemerintah menjadi lebih kecil dibandingkan konsumsi kolektif. Proporsi Konsumsi Kolektif terhadap konsumsi akhir pemerintah dalam PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Pengeluaran pada tahun 2024 adalah sebesar 50,29 persen, sedangkan Proposi Konsumsi Individu sebesar 49,71 persen. Hal ini menggambarkan sub komponen konsumsi kolektif dan individu memiliki peranan yang hampir sama terhadap konsumsi akhir pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3.5. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada sajian PDRB Menurut Pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (income) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)². Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (indirect input) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Data pada Tabel 13 di bawah menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami pergerakan yang berfluktuatif. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan komponen PMTB tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 8,98 persen. Tingginya laju pertumbuhan komponen PMTB ini dipengaruhi oleh tingginya laju pertumbuhan sub komponen bangunan dan non bangunan. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya laju pertumbuhan kedua sub komponen ini adalah karena adanya pembangunan smelter milik Amman Mineral Group di Kabupaten Sumbawa Barat. Sedangkan pada tahun 2024, pertumbuhan komponen PMTB sebesar 3,11 persen. Pertumbuhan ini melambat dibandingkan dengan tahun 2023, disebabkan telah selesainya Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa smelter pengolahan konsentrat tembaga.

Tabel 13. Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024

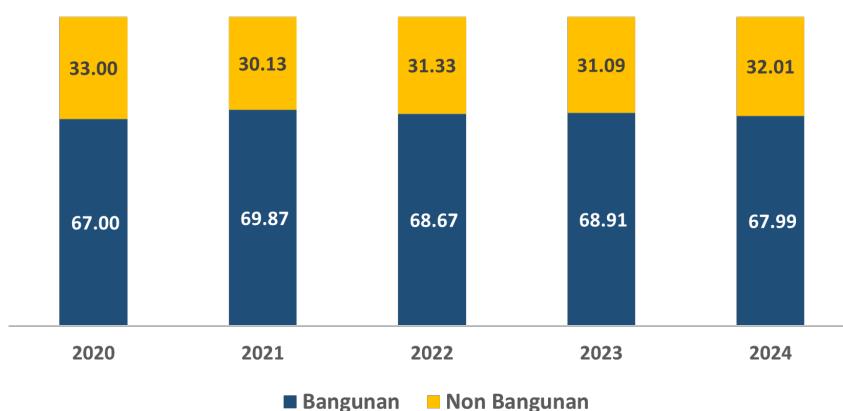
Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB (miliar rupiah)					
a. ADH Berlaku	49.488,70	53.100,50	54.581,65	61.284,64	64.075,34
b. ADH Konstan 2010	30.386,40	31.589,13	30.968,09	33.748,53	34.798,33
Proporsi PMTB terhadap PDRB ADH Berlaku (persen)	37,04	37,90	34,78	36,83	35,16
Struktur PMTB⁸					
a. Bangunan (miliar rupiah)	33.158,28	37.099,39	37.483,13	42.234,24	43.561,69
Proporsi Bangunan (persen)	67,00	69,87	68,67	68,91	67,99
b. Non Bangunan (miliar rupiah)	16.330,41	16.001,11	17.098,52	19.050,39	20.513,65
Proporsi Non Bangunan (persen)	33,00	30,13	31,33	31,09	32,01
Total PMTB (miliar rupiah)	49.488,70	53.100,50	54.581,65	61.284,64	64.075,34
Total Proporsi PMTB (persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Laju Pertumbuhan⁹ (persen)					
a. Bangunan	-8,42	7,65	-3,84	9,58	2,41
b. Non Bangunan	1,06	-3,64	2,34	7,67	4,65
Laju Pertumbuhan PMTB	-5,53	3,96	-1,97	8,98	3,11

⁷ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, atau dieksport

⁸ Diturunkan dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

⁹ Diturunkan dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010

Gambar 5. Proporsi Sub Komponen Bangunan dan Non Bangunan terhadap Total PMTB Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024 (persen)





Proporsi bangunan terhadap total PMTB cenderung stabil selama periode 2020-2024. Hal ini dapat dilihat dalam Grafik 6 di atas. Proporsi terbesar pada komponen PMTB ada pada sub komponen Bangunan. Pada tahun 2024 sub komponen Bangunan memiliki proporsi sebesar 67,99 persen terhadap total komponen PMTB. Artinya, laju pertumbuhan pada sub komponen Bangunan akan sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan komponen PMTB. Adanya perubahan yang terjadi pada proporsi kedua sub komponen Bangunan dan Non Bangunan ini tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen tersebut.

3.6. PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk persediaan berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan barang. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis lebih rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari nilai perubahan dan proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara penghitungannya menyebabkan komponen inventori tidak banyak dideskripsikan. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Perubahan Inventori (miliar rupiah)					
a. ADH Berlaku	824,35	320,97	346,13	336,96	1.599,89
b. ADH Konstan 2010	296,77	113,10	119,39	122,78	523,39
Proporsi Nilai Perubahan Inventori terhadap PDRB ADH Berlaku (persen)	0,62	0,23	0,22	0,20	0,88

Pada tahun 2024 perubahan inventori di Provinsi Nusa Tenggara Barat bernilai 1.599,89 miliar rupiah. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai persediaan barang yang ada pada akhir tahun 2024 lebih banyak dibandingkan nilai persediaan yang ada pada awal tahun 2024. Dimana pada tahun 2024, Secara proporsi terhadap total PDRB Menurut Pengeluaran, komponen perubahan inventori selama 5 tahun terakhir memiliki proporsi yang berkisar antara 0,20 hingga 0,88 persen.

3.7. PERKEMBANGAN EKSPOR

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Fluktuasi ini umumnya dipengaruhi oleh ekspor konsentrat tembaga dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang bergantung kepada kuota ekspor dan hasil produksi dari perusahaan pertambangannya. Pada tahun 2024, ekspor barang dan jasa di Provinsi Nusa Tenggara Barat tumbuh sebesar 5,77 persen. Ekspor luar negeri utamanya konsentrat tembaga masih mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023, namun



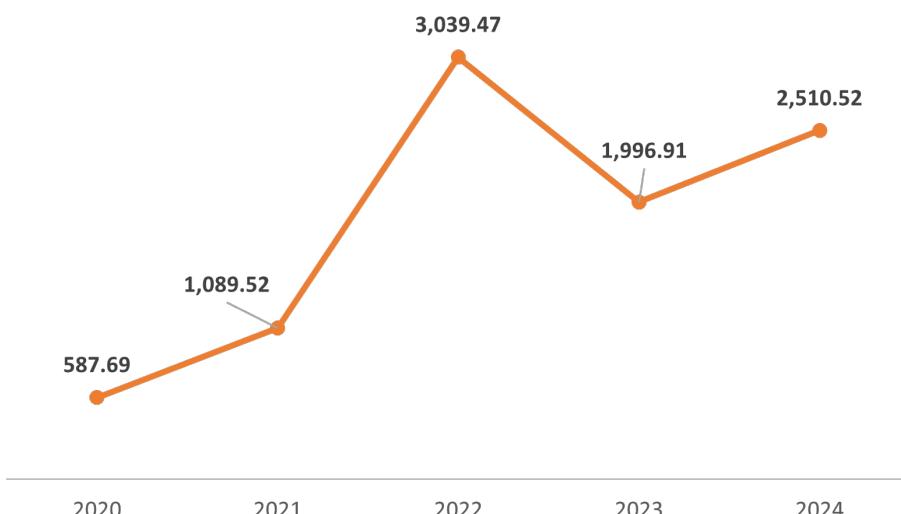
Tabel 15. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024

Uraian	2020 (1)	2021 (2)	2022 (3)	2023* (4)	2024** (5)
Total Nilai Ekspor Barang dan Jasa (miliar rupiah)					
a. ADH Berlaku	49.031,39	56.696,35	84.361,85	78.461,89	86.096,17
b. ADH Konstan 2010	25.504,20	28.073,11	40.832,87	36.425,22	38.526,63
Proporsi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB ADH Berlaku (persen)	36,72	42,46	53,75	47,15	47,24
Laju Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa (persen)	8,36	10,07	45,45	-10,79	5,77

peningkatan komponen ekspor barang dan jasa yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan ekspor komoditas jagung ke luar Provinsi NTB pada tahun 2024.

Fluktuasi nilai ekspor komoditas konsentrat tembaga dapat dilihat pada Grafik 6 di atas. Secara umum, dalam 5 tahun terakhir nilai ekspor komoditas konsentrat tembaga di Provinsi Nusa Tenggara Barat cenderung mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2023 mengalami kontraksi. Nilai ekspor komoditas konsentrat tembaga dari Provinsi Nusa Tenggara Barat paling tinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu mencapai 3.039 juta USD. Namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 dimana tercatat nilai ekspor komoditas

Grafik 6. Perkembangan Ekspor Luar Negeri Komoditas Konsentrat Tembaga, 2020-2024 (juta USD)



konsentrat tembaga hanya sebesar 1.997 juta USD. Kemudian pada tahun 2024, Kembali mengalami peningkatan yang tercatat sebesar 2.510 juta USD.

Secara struktur, ekspor komoditas konsentrat tembaga memiliki peranan sangat besar terhadap total ekspor luar negeri di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2024, peranan komoditas konsentrat tembaga terhadap total ekspor luar negeri di Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 98 persen. Oleh karena itu, fluktuasi ekspor komoditas konsentrat tembaga sangat mempengaruhi komponen ekspor secara total. Selain konsentrat tembaga, Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memiliki komoditas lain yang juga diekspor ke luar negeri. Komoditas-komoditas unggulan lainnya yang di ekspor dari Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain perhiasan (kode HS 71), ikan dan udang (kode HS 03), serta garam, belerang, kapur (kode HS 25).

3.8. PERKEMBANGAN IMPOR

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Indonesia. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangkan nilai PDRB Menurut Pengeluaran dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha. Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan adanya tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap ekonomi atau produk dari luar provinsi. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Indonesia di luar Provinsi maupun di luar negeri, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

Tabel 16 di atas menunjukan bahwa pola perkembangan impor Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode tahun 2020-2024 bergerak dinamis. Pada tahun 2020 total impor Provinsi NTB berada pada angka di 70,72 triliun rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2024 mencapai nilai 102,19 triliun rupiah.



Tabel 16. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor Barang dan Jasa (miliar rupiah)					
a. ADH Berlaku	70.720,45	78.587,49	98.642,82	97.421,80	102.194,40
b. ADH Konstan 2010	33.625,75	36.161,25	44.202,48	43.470,71	45.151,21
Proporsi Impor Barang dan Jasa terhadap PDRB ADH Berlaku (persen)	52,97	58,86	62,85	58,55	56,07
Laju Pertumbuhan Impor Barang dan Jasa (persen)	-2,39	7,54	22,24	-1,66	3,87

Sejak tahun 2020, proporsi impor barang dan jasa terhadap PDRB terus mengalami peningkatan dari 52,97 persen pada tahun 2020 menjadi 56,07 persen pada tahun 2024. Peningkatan impor barang dan jasa sejalan dengan peningkatan pada permintaan akhir di Provinsi NTB. Provinsi NTB sendiri tidak memiliki pabrik/industri besar sehingga ketersediaan barang masih bergantung dari luar Provinsi NTB untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Melihat laju pertumbuhan impor barang dan jasa di Provinsi NTB, pertumbuhan paling rendah terjadi pada tahun 2020 hingga mengalami kontraksi sebesar 2,39 persen. Pada tahun 2024, komponen impor barang dan jasa dalam PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat tumbuh sebesar 3,87 persen.

BAB IV
**PERKEMBANGAN AGREGAT
PDRB PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2020-2024**



Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PDRB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (NOMINAL)

Agregat PDRB menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran produktivitas, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Tabel 17. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (miliar rupiah)					
a. ADH Berlaku	133.613,74	140.115,27	156.942,67	166.395,45	182.265,19
b. ADH Konstan 2010	93.288,87	95.437,86	102.073,66	103.906,22	109.414,97
PDRB Per Kapita (ribu rupiah)					
a. ADH Berlaku	25.114,93	26.009,17	28.670,72	29.925,69	32.282,10
b. ADH Konstan 2010	17.535,20	17.715,84	18.647,10	18.687,20	19.379,15
Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADH Konstan 2010 (persen)	-3,75	1,03	5,26	0,22	3,70
Jumlah Penduduk (ribu rupiah)	5.320	5.387	5.474	5.560	5.646
Laju Pertumbuhan Penduduk (persen)	3,25	1,26	1,61	1,58	1,54

Selanjutnya dengan data jumlah penduduk pada tahun tertentu dari wilayah bersangkutan, maka akan dapat diperoleh nilai PDRB per kapita dari wilayah tersebut. PDRB per kapita merupakan indikator turunan PDRB yang menjelaskan output ekonomi (produktivitas) per kapita wilayah. Indikator PDRB per kapita merupakan indikator yang paling sering digunakan dan mudah dilakukan dalam membuat perbandingan antar wilayah.

PDRB per kapita Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2020-2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, PDRB per kapita Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai nilai tertinggi yaitu sebesar 32,28 juta rupiah dan terendah pada tahun 2020 sebesar 25,11 juta rupiah. PDRB per kapita Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020.

Disisilain, jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat terus meningkat. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020), pada tahun 2024 jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 5,65 juta penduduk. Jumlah penduduk ini meningkat sebanyak 1,54 persen dibandingkan tahun 2024.

4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR BARANG DAN JASA

Bagian ini akan membahas perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang dieksport. Hal ini ditunjukkan dengan indikator rasio antara nilai Konsumsi Akhir Rumah Tangga dengan Komponen Ekspor Barang dan Jasa. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkisar antara 58-61 persen pada periode 2020-2024, yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Nusa Tenggara Barat sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 18. Rasio PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga ADH Berlaku (miliar rupiah)	82.080,74	85.140,96	91.821,64	98.205,32	104.986,16
Total Ekspor Barang dan Jasa ADH Berlaku (miliar rupiah)	49.031,39	56.696,35	84.361,85	78.461,89	86.096,17
Rasio Konsumsi Rumah Tangga terhadap Ekspor Barang dan Jasa	1,67	1,50	1,09	1,25	1,22

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebesar 1,67 kali lipat dibanding produk yang dipesan. Hal ini berarti penyediaan (supply) domestik lebih banyak diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Pada tahun 2024 rasio antara konsumsi rumah tangga dan

ekspor barang dan jasa menjadi 1,22. Rasio paling rendah terjadi pada tahun 2022 yaitu hanya sebesar 1,09 yang artinya produk yang dikonsumsi rumah tangga hampir sama dengan produk yang dieksport. Penurunan rasio antara konsumsi rumah tangga dan ekspor barang dan jasa ini lebih disebabkan karena peningkatan nilai ekspor barang dan jasa, sementara konsumsi rumah tangga cenderung terus meningkat.

4.3. PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Bagian ini akan membahas perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan investasi fisik atau pembentukan modal tetap. Hal ini ditunjukkan dengan indikator rasio antara nilai Konsumsi Akhir Rumah Tangga dengan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Kedua komponen ini masing-masing memiliki peran yang besar dalam struktur PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Pengeluaran.

Tabel 19. Rasio PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024

Uraian (1)	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023* (5)	2024** (6)
Total Konsumsi Rumah Tangga ADH Berlaku (miliar rupiah)	82.080,74	85.140,96	91.821,64	98.205,32	104.986,16
Total PMTB ADH Berlaku (miliar rupiah)	49.488,70	53.100,50	54.581,65	61.284,64	64.075,34
Rasio Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB	1,66	1,60	1,68	1,60	1,64

Rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB di Provinsi Nusa Tenggara Barat cenderung stagnan selama lima tahun terakhir. Rasio ini paling tinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 1,68 yang diakibatkan oleh adanya peningkatan konsumsi rumah tangga yang cukup signifikan. Pada tahun 2024, rasio ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 1,64. Peningkatan ini mengindikasikan penurunan penggunaan produk untuk kegiatan investasi di Provinsi NTB dan lebih banyak digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

4.4. PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 20. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir ADH Berlaku (miliar rupiah)					
a. Rumah Tangga	82.080,74	85.140,96	91.821,64	98.205,32	104.986,16
b. LNPRT	2.178,74	2.230,78	2.476,77	2.725,54	3.091,47
c. Pemerintah	20.730,28	21.213,21	21.997,45	22.802,91	24.610,56
Jumlah	104.989,76	108.584,95	116.295,86	123.733,77	132.688,20
PDRB ADH Berlaku (miliar rupiah)	133.613,74	140.115,27	156.942,67	166.395,45	182.265,19
Proporsi	78,58	77,50	74,10	74,36	72,80

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Proporsi konsumsi akhir terhadap PDRB di Provinsi Nusa Tenggara Barat berfluktuasi pada rentang 72 sampai 78 selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 proporsi konsumsi akhir terhadap PDRB sebesar 78,58 dan cenderung mengalami penurunan hingga pada tahun 2022 menjadi 74,10. Pada tahun 2023 kembali meningkat dengan nilai sebesar 74,36 dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 72,80.

4.5. PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP TERHADAP PDRB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar wilayah regional atau luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor barang dan jasa terhadap



PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk yang dieksport dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 21. Rasio Ekspor Barang dan Jasa terhadap PMTB Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Ekspor Barang dan Jasa ADH Berlaku (miliar rupiah)	49.031,39	56.696,35	84.361,85	78.461,89	86.096,17
Total PMTB ADH Berlaku (miliar rupiah)	49.488,70	53.100,50	54.581,65	61.284,64	64.075,34
Rasio Ekspor Barang dan Jasa terhadap PMTB	0,99	1,07	1,55	1,28	1,34

Pada tahun 2020-2024 terlihat pada Tabel 21 di atas terlihat bahwa kecenderungan nilai ekspor barang dan jasa Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih besar dibanding nilai PMTB kecuali pada tahun 2020. Hal ini lebih disebabkan oleh tingginya kinerja ekspor yang utamanya ekspor luar negeri pada empat tahun terakhir. Tingginya arus ekspor di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini utamanya dikarenakan tingginya nilai ekspor komoditas konsentrat tembaga.

Untuk menghasilkan seluruh produk domestik, termasuk ekspor, disyaratkan tersedianya sejumlah kapital yang di dalamnya termasuk pula kapital impor. Rasio ekspor terhadap PMTB berada pada angka 0,99 pada tahun 2020 kemudian terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 menjadi 1,55. Sedangkan pada tahun 2023 rasio ini sedikit menurun menjadi 1,28 dan pada tahun 2024 menjadi 1,34. Rasio yang bernilai lebih besar dari 1 yang artinya nilai ekspor yang melampaui nilai PMTB.

4.6. PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Impor merupakan produk yang tidak diproduksi di wilayah domestik, baik itu diproduksi di luar wilayah regional maupun luar negeri, tetapi diperdagangkan di dalam wilayah domestik. Dalam bagian ini akan dibahas perbandingan PDRB yang dihasilkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan impor barang dan jasanya. Rasio antara PDRB dengan nilai impor barang dan jasa dapat memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah domestik (PDRB) Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan produk yang berasal dari impor, baik itu dari luar wilayah provinsi maupun luar negeri. Selain

itu data ini dapat menjelaskan tentang ketergantungan PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap produk yang dihasilkan oleh wilayah lain.

Tabel 22. Rasio PDRB terhadap Impor Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PDRB ADH Berlaku (miliar rupiah)	133.613,74	140.115,27	156.942,67	166.395,45	182.265,19
Total Impor Barang dan Jasa ADH Berlaku (miliar rupiah)	70.720,45	78.587,49	98.642,82	97.421,80	102.194,40
Rasio PDRB terhadap Impor Barang dan Jasa	1,89	1,78	1,59	1,71	1,78

Rasio PDRB terhadap impor barang dan jasa di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2020 hingga 2022 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020, rasio PDRB terhadap impor barang dan jasa adalah sebesar 1,89 kemudian pada tahun 2022 rasionalnya hanya sebesar 1,59. Rasio PDRB terhadap impor yang terus mengalami penurunan yang lebih disebabkan oleh peningkatan nilai impor yang cukup tinggi dibandingkan dengan peningkatan total PDRB. Penurunan rasio ini menunjukkan peningkatan ketergantungan PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap produk impor.

Kemudian pada tahun 2023-2024, rasio antara PDRB dan impor barang dan jasa di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan. Rasio antara PDRB dan impor barang dan jasa di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2023 adalah sebesar 1,71 sedangkan pada tahun 2024 sebesar 1,78. Meningkatnya rasio ini dikarenakan peningkatan PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan nilai impor barang dan jasa yang masuk ke Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4.7. KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Bagian ini akan membahas total permintaan akhir di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Permintaan akhir didapatkan dari penjumlahan nilai PDRB dan nilai impor barang dan jasa. Proporsi antara nilai PDRB dan nilai impor barang dan jasa ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).



Tabel 23. Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024 (miliar rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Penyediaan					
a. PDRB ADH Berlaku (miliar rupiah)	133.613,74	140.115,27	156.942,67	166.395,45	182.265,19
Proporsi PDRB ADH Berlaku (persen)	65,39	64,07	61,41	63,07	64,07
b. Impor Barang dan Jasa ADH Berlaku (miliar rupiah)	70.720,45	78.587,49	98.642,82	97.421,80	102.194,40
Proporsi Impor Barang dan Jasa ADH Berlaku (persen)	34,61	35,93	38,59	36,93	35,93
Total Permintaan Akhir¹⁰ (miliar rupiah)	204.334,20	218.702,76	255.585,49	263.817,25	284.459,59
Proporsi Total Permintaan Akhir (persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dari Tabel 23 diatas, terlihat bahwa permintaan akhir di Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 total permintaan akhir di Provnsi Nusa Tenggara Barat bernilai 204,33 triliun rupiah kemudian terus meningkat setiap tahunnya hingga bernilai 284,46 triliun rupiah pada tahun 2024. Dari sisi penyediaan, produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik Provinsi Nusa Tenggara Barat juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir agar dapat menyeimbangkan permintaan akhir di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2020 produksi domestik Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 133,61 triliun rupiah dan terus meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2024 nilainya mencapai 182,26 triliun rupiah. Produksi barang dan jasa dari dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dapat memenuhi permintaan akhir sekitar 64 persen.

Peningkatan konsumsi akhir di Provinsi Nusa Tenggara Barat diiringi peningkatan penyediaan produk barang dan jasa baik yang diproduksi di wilayah domestik maupun di luar wilayah. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar negeri dan luar Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nilai produk yang didatangkan dari luar provinsi dan luar negeri atau

¹⁰ Termasuk diskrepansi statistik

disebut dengan impor barang dan jasa pada tahun 2024 adalah sebesar 102,19 triliun rupiah atau sekitar 36 persen dari total nilai permintaan akhir di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nilai ini sedikit meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 97,42 triliun rupiah. Tingginya impor barang dan jasa ini menunjukkan bahwa produksi domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan akhir di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4.8. NERACA PERDAGANGAN (*TRADE BALANCE*)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai Eksport Neto. Apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka eksport neto akan terjadi surplus, dan bila yang sebaliknya maka mengalami defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya eksport atau impor suatu daerah sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Tabel 24. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024

Uraian (1)	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023* (5)	2024** (6)
Ekspor Barang dan Jasa ADH Berlaku (miliar rupiah)	49.031,39	56.696,35	84.361,85	78.461,89	86.096,17
Impor Barang dan Jasa ADH Berlaku (miliar rupiah)	70.720,45	78.587,49	98.642,82	97.421,80	102.194,40
Net Ekspor (Ekspor – Impor) (miliar rupiah)	-21.689,06	-21.891,14	-14.280,97	-18.959,91	-16.098,23
Rasio Ekspor terhadap Impor	0,69	0,72	0,86	0,81	0,84



Selama periode tahun 2020-2024, posisi perdagangan barang dan jasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luar negeri dan antar provinsi, selalu menunjukkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Provinsi Nusa Tenggara Barat selalu dalam posisi defisit. Defisit perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tercatat pada tahun 2020 adalah 21,69 triliun rupiah. Defisit perdagangan yang dialami oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat ini cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami defisit perdagangan sebesar 16,1 triliun rupiah. Hal ini menggambarkan adanya aliran devisa keluar di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, rasio ekspor terhadap impor di Provinsi Nusa Tenggara Barat cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Rasio ekspor barang dan jasa terhadap impor barang dan jasa di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2024 adalah sebesar 0,84. Nilai rasio yang kurang dari 1 ini menunjukkan bahwa nilai ekspor barang dan jasa di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih lebih kecil dibandingkan nilai impor barang dan jasanya. Rasio ekspor dan impor yang terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,69 dan sedangkan yang tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,86.

4.9. RASIO PERDAGANGAN INTERNASIONAL (RPI)

Rasio Perdagangan Internasional (RPI) merupakan perbandingan aktivitas perdagangan internasional dari suatu wilayah. RPI akan menunjukkan dominasi ekspor luar negeri atau impor luar negeri di wilayah tersebut. Formulasinya diperoleh dengan menghitung nilai ekspor luar negeri dikurangi impor luar negeri dibagi dengan jumlah ekspor luar negeri dan impor luar negeri. Rentang koefisien RPI adalah $-1 < \text{RPI} < 1$. Jika RPI mendekati nilai minus satu maka perdagangan internasional didominasi oleh impor, sedangkan apabila mendekati nilai positif satu maka perdagangan internasional didominasi oleh transaksi ekspor.

Tabel 25. Rasio Perdagangan Internasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor Luar Negeri ADH Berlaku (miliar rupiah)	8.954,78	16.723,85	43.537,92	34.687,64	44.192,12
Impor Luar Negeri ADH Berlaku (miliar rupiah)	4.106,17	2.245,99	3.272,33	9.133,31	14.405,86
Ekspor – Impor (miliar rupiah)	4.848,62	14.477,85	40.265,59	25.554,34	29.786,26
Ekspor + Impor (miliar rupiah)	13.060,95	18.969,84	46.810,26	43.820,95	58.597,99
RPI	0,37	0,76	0,86	0,58	0,51

Nilai ekspor luar negeri di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2023. Nilai ekspor luar negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020 adalah sebesar 8,95 triliun rupiah dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2022 yaitu sebesar 43,54 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2023 nilai ekspor luar negeri ini mengalami sedikit penurunan dengan nilai sebesar 34,70 triliun rupiah dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 44,19 triliun rupiah. Fluktuasi nilai ekspor luar negeri di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini adalah dampak dari tingginya ekspor konsentrat tembaga keluar negeri.

Nilai impor luar negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat pada rentang waktu 2020-2024 juga berfluktuasi. Penurunan nilai impor luar negeri berlangsung dari tahun 2020 hingga 2021, yaitu dari 4,11 triliun rupiah hingga menjadi 2,25 triliun rupiah. Kemudian nilai impor luar negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 14,41 triliun rupiah pada tahun 2024.

Meskipun ada fluktuasi pada nilai ekspor luar negeri dan impor luar negeri di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tabel 25 di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2020-2024 posisi ekspor luar negeri selalu lebih tinggi dari impor luar negeri. Rasio Perdagangan Internasional (RPI) Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode waktu tersebut selalu bernilai positif sehingga mengindikasikan bahwa perdagangan internasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat selalu didominasi oleh kegiatan ekspor. Nilai RPI Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai titik tertinggi pada tahun 2022, yaitu sebesar 0,86. Peningkatan kegiatan ekspor luar negeri yang signifikan pada tahun 2022 menjadi penyebab tingginya RPI tersebut. Sedangkan nilai RPI Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terrendah terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 0,37. Nilai RPI yang mendekati 0 ini menunjukkan bahwa kegiatan ekspor luar negeri dan impor luar negeri di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada masa itu dapat dikatakan tidak berbeda jauh.

4.10. INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan *output* adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui



parameter nilai tambah.

Dengan menggunakan rasio antara kapital dan *output* ini, ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output. Dapat diartikan juga bahwa setiap penambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak K unit. Formula ICOR adalah sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Dimana I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

K = Kapital

Tabel 26. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB ADH Konstan 2010 (miliar rupiah)	93.872,44	93.288,87	95.437,86	102.073,66	103.905,92
Selisih PDRB ADH Konstan 2010 dengan tahun sebelumnya (miliar rupiah)	3.523,31	-583,57	2.148,99	6.635,80	1.832,26
PMTB ADH Konstan 2010 (miliar rupiah)	32.163,88	30.386,40	31.589,13	30.968,09	33.748,53
ICOR	9,13	-52,07	14,70	4,67	18,42

Tabel 26 di atas menunjukkan nilai ICOR Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berfluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2024 nilai ICOR Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 6,32. Artinya, pada tahun 2024 dalam setiap penambahan satu unit nilai PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 dibutuhkan penambahan kapital sebanyak 6 unit. Nilai ICOR pada tahun 2024 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 yang merupakan angka tertinggi. Tingginya nilai ICOR Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2023 ini salah satunya adalah dikarenakan adanya pembangunan smelter untuk mengolah tembaga milik Amman Mineral Group di Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB V

PENUTUP



1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2020-2024 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2020-2024, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current tranfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).

DAFTAR PUSTAKA

https://introps.go.id



- Badan Pusat Statistik, Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri, Jakarta, 1980-1990.
- Badan Pusat Statistik, Pendapatan Nasional Indonesia, berbagai seri, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, Profil Ekonomi Rumahtangga 1998, Jakarta, 1999.
- Badan Pusat Statistik, Statistik Industri, berbagai seri, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, Statistik Keuangan BUMN dan BUMD 1997, Jakarta, 2000.
- Badan Pusat Statistik, Statistik Konstruksi, berbagai seri, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, Statistik Listrik, Gas dan Air, berbagai seri, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat, berbagai seri, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, Statistik Pertambangan Migas, berbagai seri, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, Statistik Pertambangan Non Migas, berbagai seri, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, Tabel Input Output Indonesia, berbagai seri, Jakarta.
- Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
- Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview, Pamphlet Series*, No. 29, Washington DC, 1979.
- Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4*, Jakarta 1988.
- United Nations, A System of National Accounts, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3*, New York, 1968.
- United Nations, Input-Output Table and Analysis, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1*, New York, 1973.
- United Nations, Handbook of National Accounting for Production, Sources and Methods, Series F No. 39*, New York, 1986.
- United Nations, Handbook of National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 50*, New York, 1988.
- United Nations, Link between Business Accounting and National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 76*, New York, 2000.
- Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.

Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, Washington DC, 1993.

<https://www.bps.go.id/> terakhir diakses pada 26 Maret 2023.

<https://ntb.bps.go.id/> terakhir diakses pada 26 Maret 2023.

<https://ntb.bps.go.id/>

LAMPIRAN



Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2020-2024 (miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran		2020	2021	2022	2023*	2024**	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	82.080,74		85.140,96	91.821,64	98.205,32	104.986,16
a.	Makanan dan Minuman, selain Restoran	34.460,08		36.094,85	38.418,18	41.425,50	44.777,93
b.	Pakaian, Alas Kaki, dan Jasa Perawatannya	3.041,46		3.103,56	3.282,87	3.475,97	3.653,23
c.	Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	17.318,35		17.782,18	18.951,09	20.200,66	21.340,28
d.	Kesehatan dan Pendidikan	8.398,87		8.877,44	9.255,05	9.729,05	10.292,72
e.	Transportasi dan Komunikasi	11.281,97		11.608,41	13.217,55	14.002,21	14.765,70
f.	Restoran dan Hotel	3.213,33		3.271,07	3.877,13	4.151,67	4.457,65
g.	Lainnya	4.366,68		4.403,44	4.819,77	5.220,24	5.698,64
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.178,74		2.230,78	2.476,77	2.725,54	3.091,47
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	20.730,28		21.213,21	21.997,45	22.802,91	24.610,56
a.	Konsumsi Kolektif	10.203,71		10.319,11	10.819,40	11.404,31	12.377,80
b.	Konsumsi Individu	10.526,57		10.894,10	11.178,05	11.398,60	12.232,76
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	49.488,70		53.100,50	54.581,65	61.284,64	64.075,34
a.	Bangunan	33.158,28		37.099,39	37.483,13	42.234,24	43.561,69
b.	Non Bangunan	16.330,41		16.001,11	17.098,52	19.050,39	20.513,65
5.	Perubahan Inventori	824,35		320,97	346,13	336,96	1.599,89
6.	Net Ekspor Barang dan Jasa	-21.689,06		-21.891,14	-14.280,97	-18.959,91	-16.098,23
a.	Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	8.954,78		16.723,85	43.537,92	34.687,64	44.192,12
b.	Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	4.106,17		2.245,99	3.272,33	9.133,31	14.405,86
c.	Net Ekspor Barang dan Jasa Antar Daerah	-26.537,68		-36.369,00	-54.546,56	-44.514,25	-45.884,49
PDRB		133.613,74	140.115,27	156.942,67	166.395,45	182.265,19	

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2020-2024 (miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran		2020	2021	2022	2023*	2024**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	56.729,84	57.753,14	60.050,17	62.459,15	65.238,19
a.	Makanan dan Minuman, selain Restoran	22.581,16	22.931,50	23.268,25	24.118,80	25.338,19
b.	Pakaian, Alas Kaki, dan Jasa Perawatannya	2.122,63	2.140,39	2.198,50	2.281,52	2.374,20
c.	Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	11.953,32	12.128,23	12.539,44	13.147,45	13.696,35
d.	Kesehatan dan Pendidikan	5.614,40	5.895,34	6.088,58	6.319,06	6.585,11
e.	Transportasi dan Komunikasi	9.459,21	9.626,63	10.429,64	10.803,31	11.194,58
f.	Restoran dan Hotel	2.191,21	2.204,54	2.527,61	2.640,27	2.774,12
g.	Lainnya	2.807,91	2.826,52	2.998,15	3.148,74	3.275,65
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.488,08	1.496,15	1.583,83	1.680,74	1.870,02
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12.509,34	12.574,48	12.721,80	12.940,51	13.609,62
a.	Konsumsi Kolektif	6.519,80	6.465,67	6.562,71	6.741,81	7.088,73
b.	Konsumsi Individu	5.989,55	6.108,82	6.159,10	6.198,70	6.520,89
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	30.386,40	31.589,13	30.968,09	33.748,53	34.798,33
a.	Bangunan	20.455,26	22.019,08	21.174,24	23.203,34	23.762,71
b.	Non Bangunan	9.931,14	9.570,05	9.793,85	10.545,18	11.035,62
5.	Perubahan Inventori	296,77	113,10	119,39	122,78	523,39
6.	Net Ekspor Barang dan Jasa	-8.121,55	-8.088,14	-3.369,61	-7.045,48	-6.624,59
a.	Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	5.577,54	9.363,12	22.113,78	17.406,32	21.446,80
b.	Impor Barang dna Jasa Luar Negeri	2.456,04	1.367,94	1.944,93	4.924,63	7.492,88
c.	Net Ekspor Barang dan Jasa Antar Daerah	-11.243,06	-16.083,32	-23.538,47	-19.527,18	-20.578,50
PDRB		93.288,87	95.437,86	102.073,66	103.906,22	109.414,97



Tabel 3. Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Pengeluaran, 2020-2024 (persen)

Komponen Pengeluaran		2020	2021	2022	2023*	2024**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	61,43	60,76	58,51	59,02	57,60
a.	Makanan dan Minuman, selain Restoran	25,79	25,76	24,48	24,90	24,57
b.	Pakaian, Alas Kaki, dan Jasa Perawatannya	2,28	2,22	2,09	2,09	2,00
c.	Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	12,96	12,69	12,08	12,14	11,71
d.	Kesehatan dan Pendidikan	6,29	6,34	5,90	5,85	5,65
e.	Transportasi dan Komunikasi	8,44	8,28	8,42	8,42	8,10
f.	Restoran dan Hotel	2,40	2,33	2,47	2,50	2,45
g.	Lainnya	3,27	3,14	3,07	3,14	3,13
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,63	1,59	1,58	1,64	1,70
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	15,52	15,14	14,02	13,70	13,50
a.	Konsumsi Kolektif	7,64	7,36	6,89	6,85	6,79
b.	Konsumsi Individu	7,88	7,78	7,12	6,85	6,71
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	37,04	37,90	34,78	36,83	35,16
a.	Bangunan	24,82	26,48	23,88	25,38	23,90
b.	Non Bangunan	12,22	11,42	10,89	11,45	11,25
5.	Perubahan Inventori	0,62	0,23	0,22	0,20	0,88
6.	Net Ekspor Barang dan Jasa	-16,23	-15,62	-9,10	-11,39	-8,83
a.	Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	6,70	11,94	27,74	20,85	24,25
b.	Impor Barang dna Jasa Luar Negeri	3,07	1,60	2,09	5,49	7,90
c.	Net Ekspor Barang dan Jasa Antar Daerah	-19,86	-25,96	-34,76	-26,75	-25,17
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 4. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2020-2024 (persen)

Komponen Pengeluaran		2020	2021	2022	2023*	2024**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-2,93	1,80	3,98	4,01	4,45
a.	Makanan dan Minuman, selain Restoran	-1,91	1,55	1,47	3,66	5,06
b.	Pakaian, Alas Kaki, dan Jasa Perawatannya	-1,48	0,84	2,72	3,78	4,06
c.	Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1,31	1,46	3,39	4,85	4,17
d.	Kesehatan dan Pendidikan	0,54	5,00	3,28	3,79	4,21
e.	Transportasi dan Komunikasi	-11,45	1,77	8,34	3,58	3,62
f.	Restoran dan Hotel	-7,92	0,61	14,65	4,46	5,07
g.	Lainnya	-0,57	0,66	6,07	5,02	4,03
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-1,70	0,54	5,86	6,12	11,26
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,16	0,52	1,17	1,72	5,17
a.	Konsumsi Kolektif	0,55	-0,83	1,50	2,73	5,15
b.	Konsumsi Individu	1,82	1,99	0,82	0,64	5,20
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	-5,53	3,96	-1,97	8,98	3,11
a.	Bangunan	-8,42	7,65	-3,84	9,58	2,41
b.	Non Bangunan	1,06	-3,64	2,34	7,67	4,65
5.	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6.	Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
a.	Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	44,29	67,87	136,18	-21,29	23,21
b.	Impor Barang dna Jasa Luar Negeri	-5,85	-44,30	42,18	153,20	52,15
c.	Net Ekspor Barang dan Jasa Antar Daerah	-	-	-	-	-
	PDRB	-0,62	2,30	6,95	1,80	5,30



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptil Kolaboratif



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

http://ntb.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jl. Dr. Sudjono No. 74 Mataram 83116
Telp (62-370) 621385, Faks (62-370) 623801
Homepage: <http://ntb.bps.go.id>
Mailbox: bps5200@bps.go.id, pst5200@bps.go.id

